

Analisis Penyebab Terjadinya Perubahan Status Kewarganegaraan (Studi Kasus Di Wilayah Perbatasan Kabupaten Nunukan Kecamatan Lumbis Ogong Dengan Kota Kinabalu Negeri Sabah, Malaysia

Henny Juniati

Abstract

This journal aims to explain and describes the problems exists in Indonesian border, especially in the Nunukan District of Lumbis Ogong at North Borneo, bordering Sabah State which is the area of the State of East Malaysia. It contains of common problems in the border region affecting the citizenship status change by some residents of 29 villages in Lumbis Ogong. This research also analyze the factors that cause changes in the status of citizenship at the border, those are infrastructure, education, health, and geographical factors complicating access for people to go to work. However, on Lumbis Ogong, crossing to the border are easy and it gives the benefit to residents of Lumbis Ogong who work and settle at in Kota Kinabalu.

Keywords: Border, Nationality, Indonesia, Nunukan, Lumbis Ogong, Malaysia, Kota Kinabalu, Negeri Sabah.

Pendahuluan

Batas atau *teritorial* merupakan sebuah unsur penting sebuah negara yang dapat mempengaruhi wilayah kekuasaan dan juga kedaulatan sebuah Negara. Dengan adanya batas yang jelas antar dua Negara atau lebih dapat menjadikan keduanya untuk saling menghargai wilayah teritorial masing-masing dan dapat mempererat hubungan sebagai Negara yang berdekatan. Selanjutnya unsur penting dari syarat berdirinya sebuah Negara yaitu penduduk dan Negara wajib untuk memberikan hak warganegaranya begitu juga sebaliknya.

Indonesia merupakan Negara yang berdaulat memiliki batas baik di darat, laut dan udara. Selain itu Indonesia memiliki Pulau-pulau mulai dari yang terbesar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulwaesi, dan Papua serta terdapat juga pulau kecil terluar, sampai dengan pulau yang tidak berpenghuni. Selain itu Indonesia merupakan sebuah Negara yang memiliki batas wilayah yang berdekatan dengan Negara lain seperti, Malaysia, Thailand, Brunei, Timor leste, laut Cina selatan, Singapura, Papua Nugini, fillipina, dan Australia.

Permasalahan perbatasan yang terjadi pada Indonesia-Malaysia memang sudah lama terjadi baik dalam kasus perbatasan di maritim maupun darat, permasalahan tersebut dapat menjadi gangguan terhadap keamanan masing-masing Negara dengan terus berseteru untuk menentukan batas dari keduanya tanpa ada kesepakatan yang telah di implementasikan tanpa

diratifikasi. Selain itu, bisa jadi gangguan tersebut berdampak besar yang kemungkinan dapat terjadi yaitu dapat terjadinya saling klaim.

Menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa wilayah Negara adalah salah satu unsur Negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk sumber daya kekayaan yang terkandung didalamnya. Hal yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 terhadap pemerintah Negara untuk mendorong peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar, dan memperkuat kondisi ketahanan masyarakat dalam pertahanan Negara. Wilayah perbatasan perlu mendapatkan perhatian karena kondisi tersebut akan mendukung keamanan nasional dalam kerangka NKRI.

Sedangkan menurut Aristoteles Negara adalah perkumpulan dari keluarga dan desa untuk meraih kehidupan yang sebaik-baiknya. Sedangkan dalam perjanjian Westphalia pada tahun 1648 Negara dikenal sebagai konsep *Nation-state* yakni posisi Negara sebagai yang tertinggi atas teritorial yaitu sebagai pemegang kedaulatan wilayah beserta penduduk yang ada didalamnya. Negara yang memiliki kedaulatan tersebut memiliki sistem pemerintahan sebagai otoritas yang mengatur suatu wilayah dan tidak memiliki otoritas diluar wilayahnya. (Spruyt, 2000)

Kasus permasalahan yang terjadi pada kawasan perbatasan Lumbis Ogong yaitu adanya kajian yang menarik berupa perubahan status kewarganegaraan yang disebabkan oleh beberapa faktor yang biasa terdapat di kawasan perbatasan yaitu berupa permasalahan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, selain itu berdampak pula pada sedikitnya produktifitas warga perbatasan akibat dari imbas minimnya pendidikan pada kawasan tersebut. Selain itu, akses yang sulit menyebabkan Lumbis Ogong sebagai Lokpri (lokasi prioritas) yang merupakan lokasi yang telah ditetapkan oleh BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) untuk dikelola dan diperhatikan pembangunan mengenai permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan diatas.

Permasalahan-permasalahan yang ada di butuhkan beberapa teori dan konsep yang diperlukan untuk memudahkan menganalisis permasalahan dan apa yang sebenarnya menjadi faktor. Faktor yang utama dapat penyebab terjadi perubahan status kewarganegaraan ini adalah ekonomi yang menjadi dasar landasan untuk mempertahankan hajat hidup diri sendiri maupun

keluarganya. Sedangkan untuk permasalahan perbatasan Menurut Stephen B. Jones dalam *Boundary Making Theory* menyebutkan ada empat tahap yang termasuk dalam ruang lingkup pengelolaan perbatasan yaitu, *Aliocation, Delimitation, Demarcation, dan Administration*. Pada studi kasus ini pengelolaan yang perlu dilakukan paling tidaknya untuk menjaga perbatasan dan penduduknya yaitu menggunakan tahapan keempat yaitu administrasi atau pengelolaan.

pengelolaan wilayah perbatasan yang baik dapat saja menumpang-tindihkan atau menjalankan secara bersamaan proses pembangunan perbatasan dan demarkasi. Hal ini dapat dimengerti karena, proses penyelesaian masalah dan pembangunan bidang-bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik memerlukan waktu yang panjang. Selain itu diperlukan pula sosialisasi pemahaman bagi penduduk di kawasan perbatasan, bahwa setelah penegasan batas ditentukan, mereka dapat terpisah secara administratif kenegaraan dengan sanak keluarga dan kerabat yang berlainan warganegara. Dalam tahap ini pula, seluruh aspek pemerintahan dalam negeri termasuk didalamnya. Pemerintahan Daerah dapat terlibat secara aktif dalam pengelolaan perbatasan. (Kartikasari, 2012, hal. 151)

Dalam hal faktor ekonomi sebagai permasalahan yang mendasar yaitu tentang setiap tindakan manusia yang dilandasi atas dasar pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan. Dengan demikian manusia dapat meningkatkan kehidupannya. Kata rasional mempunyai arti pikiran atau pertimbangan yang logis atau masuk akal. Artian tindakan ekonomi rasional sendiri adalah setiap tindakan manusia yang dilandasi atas dasar pilihan yang terbaik dan paling menguntungkan. Tindakan yang rasional diperlukan oleh manusia baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam melakukan usaha. Berdasarkan pertimbangan untung rugi, manusia dapat meningkatkan kehidupannya.

Pertimbangan yang rasional dimulai dari hal kecil sampai hal yang besar. Ciri-ciri tindakan ekonomi yang rasional yaitu tindakan ekonomi untuk memperoleh kepuasan maksimal dengan pengorbanan minimal. Hal itu dalam ilmu ekonomi dinamakan prinsip ekonomi, kemudian tindakan ekonomi itu didorong oleh suatu kepentingan. Dorongan semacam itu dalam ilmu ekonomi dinamakan motif ekonomi. Dengan demikian, tindakan ekonomi secara rasional dimaksudkan sebagai penghematan, mendatangkan keuntungan dan tepat pelaksanaannya. (<http://www.gerbangilmu.com/2014/11/pengertian-tindakan-ekonomi-rasional.htm> (diakses pada : 12 Oktober 2015, 2014)

Realita yang terjadi pada keadaan ekonomi di Lumbis Ogong adalah taraf hidup yang bisa dikatakan dalam kategori miskin atau masyarakat yang kurang mampu yang mana jika tetap bertahan dengan keadaan yang ada di Lumbis Ogong akan menjadikan warga-warga dalam keadaan ekonomi yang sulit. Belum lagi jika mereka harus mengadu nasib ke kota atau ke Nunukan akan lebih sulit lagi sedangkan kebanyakan dari warga Nunukan juga mengadu nasib ke Negeri Sabah Malaysia. Dengan melihat adanya peluang yang lebih besar dan untuk mendapatkan keuntungan bekerja di Kinabalu, serta melihat contoh rekan atuanya adanya sanak saudara yang berhasil di Kinabalu dengan mengantongi IC (*identity Card*) Malaysia menjadi dorongan keinginan dari warga desa-desa yang ada di Lumbis Ogong merubah kewarganegaraannya. Selain itu, mereka yang ingin berpindah mendapat jaminan dari keluarga atau kerabat mereka yang telah menjadi penduduk tetap di Negeri Sabah.

Kondisi Geografis Kawasan Perbatasan Nunukan di Lumbis Ogong

Kelemahan Indonesia pada kawasan perbatasannya yaitu aspek geografis. Maksudnya disini adalah bentuk wilayah Indonesia yang banyak memiliki daerah perairan dan pulau sehingga yang penyebab terjadinya pembangunan tidak merata, adanya wilayah terpencil dan daerah tertinggal merupakan akibat dari bentuk geografis Indonesia yang terpisah-pisah oleh wilayah perairan. Selain itu dalam hal wilayah Indonesia juga memiliki jarak tempuh yang jauh dari satu tempat ketempat lain dan medan yang dilalui juga tidak mudah untuk dilewati, karena hal itulah terkadang yang membuat pemerintah dalam perannya juga kurang bisa memaksimalkan upaya-upaya di perbatasan karena memang dari segi medan dan juga anggaran yang besar untuk mengunjungi ataupun melakukan observasi ke daerah-daerah perbatasan.

Kelebihan pertama dari kondisi aspek geografis yaitu, karena jarak Indonesia dan Negara tetangga yang berdekatan justru mempermudah jalinan kerjasama Indonesia di perbatasan yang bertujuan mempererat dengan kepentingan untuk menjaga keamanan masing-masing wilayah, Contoh kerjasamanya adalah kesepakatan perdangan lintas batas (*border trade agreement*) antara RI-Malaysia. Karena jarak RI-Malaysia yang dekat keuntungan lain yang didapat adalah masing-masing dari warga kedua Negara aksesnya lebih mudah karena akomodasi yang cukup memadai untuk perjalanan keluar Negeri.

Ketiga, pada daerah Kalimantan umumnya yang paling menonjol pada pembahasan mengenai kelebihan yaitu dari segi hutan dan hasil perkebunan. Hutan Kalimantan terkenal sebagai hutan yang hijau dan sehat menjadikan hutan–hutan yang ada di Indonesia sebagai tiga dari paru-paru dunia. Kawasan hutan lindung yang dimiliki Kalimantan juga dapat dijadikan objek wisata jika dikelola dengan baik dapat menarik minat para wisatawan ataupun menjadi lahan atau tempat untuk observasi keanekaragaman hayati sebagai Hutan Lindung di perbatasan Indonesia-Malaysia.

Kondisi Geografis Kawasan Perbatasan Negeri Sabah di Kota Kinabalu

Sabah merupakan sebuah daerah yang memiliki tanah yang cocok untuk dijadikan lahan perkebunan sawit maupun coklat sehingga kelebihan dari Sabah adalah perkebunannya, ditambah lagi peran pemerintah yang menggalakkan dalam sektor perkebunan dengan lahan yang sangat luas. Namun dari kelebihan tersebut mengakibatkan dampak lain yang menyebabkan banyak berkurangnya hutan hujan, berkurangnya air bersih pada tempat penampungan-penampungan air, yang berimbas kepada tercemarnya air bersih di aliran sungai dan juga berkurangnya hutan untuk tempat satwa berlindung pada wilayah hutan Sabah.

Kelemahan dari segi sosial suku asli sudah mulai tergeser dari Sabah, namun para penduduk asli justru banyak yang mengadu nasib ataupun merantau ke Selangor dan Johor untuk pekerjaan lain selain buruh industri, selain itu pemegang atau pemilik industri disana justru suku pendatang Tiongkok. Dengan kata lain pekerjaan yang dominan disana yaitu pekerja industri dan pekerja lapangan pemantau para buruh di lahan perkebunan.

Kelebihan dari kondisi geografis Sabah yaitu mudahnya transportasi-transportasi penunjang dari satu tempat ke tempat lain. Untuk dari keuntungannya bagi pemerintah yaitu untuk pembangunan jarak dari satu kota ke kabupaten tidaklah jauh sehingga pembangunan merata dan dapat terpantau terkendali oleh pemerintah dengan artian pembangunan Nasional di Sabah berjalan dengan lancar. Sedangkan kelebihan lain untuk para pendatang seperti penduduk Lumbee menjadi ladang pekerjaan bagi mereka yang minim pendidikan dengan keahlian seadanya karena industri-industri yang digalakkan oleh pemerintah pada tiap lahan-lahan perkebunan.

Fenomena Perubahan Status Kewarganegaraan di Wilayah Perbatasan Lumbis Ogong

Perubahan status kewarganegaraan yang terjadi pada kecamatan Lumbis Ogong merupakan isu yang terus berlangsung dari tahun ketahun, tanpa adanya penyelesaian dari kedua pihak baik Indonesia dan Malaysia sebagai negara yang menjadi asal dan penerima warga yang melakukan perpindahan pada kawasan perbatasan Kalimantan Utara khususnya Kecamatan Lumbis Ogong. 12 dari 29 desa yang ada tiap desa memiliki permasalahan yang sama yakni mengenai perubahan kewarganegaraan seperti di Desa Samnunti, Kinokot, Sumantipal, Labang, Lagas, Panas, Tambalang, Langsasua, Ngawal, Tembaluhut, Tembalujud dan Sinapad yang mana penduduknya sudah banyak sekali melakukan perpindahan penduduk ke Malaysia.

Awal terjadinya fenomena perpindahan kewarganegaraan pada dasarnya dikarenakan kekurangan-kekurangan di perbatasan yaitu pertama, pada pada kondisi perekonomian baik di Nunukan maupun Lumbis Ogong tempat mencari kerja dan juga lapangan kerja tidak terbuka bagi penduduk perbatasan yang pada umumnya tertinggal dalam hal pendidikan, sehingga untuk mendapatkan pekerjaan yang layak apabila penduduk dengan pengetahuan yang minim tetap berangkat mengadu nasib ke Nunukan akan sia-sia, sedangkan pada wilayah Kinabalu mereka dapat bekerja dengan pendidikan yang mereka miliki walaupun mimim. Belum lagi kurangnya penanganan permasalahan perekonomian di Lumbis ogong.

Kondisi perekonomian perbatasan Nunukan juga tidak jauh dari pekerjaan yang sama dengan warga Lumbis Ogong untuk yang minim pendidikannya bekerja sebagai buruh penyedia jasa dan berdagang, sementara di Lumbis Ogong juga mengandalkan dan juga bergantung pada suplai-suplai barang sembako dan juga barang rumah tangga lain, hal tersebut juga menjadi alasan warga untuk berpindah kewarganegaraan. Menjadi pekerja di Kinabalu tidak sulit dalam perihal syarat mengenai pendidikan bukan hal yang utama untuk bekerja dipabrik atau pekerjaan lainnya yang ada di Kinabalu.

Jika memikirkan dari segi keuntungan, barang-barang yang di bawa dari Malaysia lebih murah dan terkadang juga tidak sulit diangkut dan dibawa oleh warga dari Malaysia yang dibandingkan barang produk Indonesia yang di beli dengan harga yang mahal yang di bawa warga Lumbis Ogong dari Nunukan. Walaupun koperasi sudah ada di Nunukan dan Lumbis

Ogong namun dengan perbandingan harga yang murah warga lebih memilih barang Malaysia, sementara itu kekurangan dari koperasi-koperasi tersebut kadang tidak selengkap barang kebutuhan atau sembako yang disediakan pasar di Kinabalu.

Kedua yaitu, infrastruktur di perbatasan sebagai penopang kemajuan produktifitas dan kesejahteraan warga di perbatasan yang menjadi alasan membuat penduduk lebih berminat menjadi warganegara Malaysia terlebih lagi akses yang mudah di perbatasan Malaysia. kemudian dengan alasan lain jarak Sabah yang lebih dekat dan akses menuju kinabalu lebih mudah dengan adanya bus-bus yang akan menjadi akomodasi mereka menuju pabrik-pabrik sawit yang ada di Kinabalu.

Untuk infrastruktur penunjang seperti bus yang ada di Kinabalu, untuk Nunukan memang sulit, dikarenakan jarak Nunukan dengan Lumbis Ogong harus melewati sungai-sungai. Pada waktu musim hujan akan sulit dilewati dan jalan akan berlumpur pada saat berjalan dari desa menuju ke tempat perahu atau sampan. Untuk waktu kemarau pun sungai menjadi dangkal dan akan sulit dilalui oleh perahu dan sampan.

Dari perpindahan tersebut diketahui bahwa perpindahan bukan hanya secara legal namun juga secara ilegal. Cara ilegal yang dimaksud yaitu dengan cara melintasi perkebunan dan melintasi hutan dengan kata lain mengendap-ngendap tanpa melewati pos pemeriksaan perbatasan atau cara lain yang diperbolehkan untuk melewati perbatasan membayar dan juga kadang jaminan dari keluarga yang sudah menjadi penduduk tetap Malaysia.

Banyak hal yang menjadi faktor penyebab perubahan kewarganegaraan Negara Malaysia tersebut, seperti jaminan atas pendidikan bagi anak-anak, terbukanya lapangan pekerjaan walaupun mereka adalah pendatang, serta terpenuhinya sarana prasarana kesehatan. Dan diantara penduduk banyak yang menggunakan Pas Lintas Batas atau Paspor namun bekerja dan menetap di berbagai kota di Malaysia tanpa di ketahui oleh pihak penjaga Lintas Batas.

Pada umumnya penduduk yang dari perbatasan Nunukan ataupun Lumbis Ogong dan beberapa dari penduduk desanya yang telah menetap menjadi warga Negara dan yang tidak kembali ke Indonesia lalu menikah dan menetap dengan keluarga Malaysiannya. Tidak jarang anak dari pernikahan tersebut memiliki kewarganegaraan Malaysia yang telah dijamin dari

kerabatnya yang merupakan penduduk tetap Malaysia. Dengan keadaan-keadaan yang serba kekurangan pada kawasan perbatasan Nunukan maka tidak jarang penduduk perbatasan harus pandai memilih pilihan yang baik untuk meneruskan hidup walaupun dengan cara merubah kewarganegaraan dengan tujuan mengubah nasib yang lebih baik dari pada tinggal di kawasan yang merupakan kawasan tertinggal dan sulit mencari penghidupan untuk keluarganya.

Kedekatan penduduk dengan Sabah juga dapat dikatakan kedekatan secara adat dan keturunan karena banyak keluarga atau penduduk lain yang berpindah terlebih dahulu ke Sabah dan banyak yang bekerja di Kinabalu, dengan melihat sanak saudara mereka dan warga lain yang lebih terdahulu pindah mereka juga mendapatkan kesempatan untuk berpindah kewarganegaraan dikarenakan cara yang lebih mudah dari pada persyaratan lain, karena jika ada kerabat atau keluarga yang telah menjadi warganegara di Sabah yang menjadi jaminan yang berlanjut pada pengurusan dokumen serta syarat yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang kewarganegaraan di Negera Malaysia yakni sesuai dengan UU Federal pasal 15 (1), 15 (2), 15A dan 19 (1) tentang Permohonan status kewarganegaraan Malaysia.

Setidaknya selama lima tahun terakhir tercatat lebih dari 3 ribu WNI mengajukan kewarganegaraan Malaysia. Berarti, sekitar 600 lebih WNI setiap tahunnya mengajukan kewarganegaraan ke pemerintah Malaysia. Warga negara asing memohon status kewarganegaraan Malaysia dalam jangka waktu lima tahun dari 2005 hingga September 2009 tercatat bahwa dari total pemohon yakni sebanyak 3.405 warga Negara dari Indonesia. (news.detik.com, 2014)

Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan yaitu, perbatasan bukan hanya sekedar batas dan bukan hanya menjaga keamanan tetori wilayah, namun ada unsur lain yang penting yaitu masyarakat yang bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah terlebih pada perbatasan, karena dengan adanya masyarakat ataupun penduduk yang bermukim turut mebanut peran pemerintah dalam menjaga tetori dengan cara sosialisai serta merangkul dari seluruh aspek masyarakat untuk menjaga kestabilan dan kemananan wilayah melauai perbatasan serta menjadikan kawasan perbatasan mejadi halaman depan bagi Indonesia, bukan sebagai tempat terpencil yang jauh dari kata sejahtera.

Perbatasan Indonesia merupakan bagian wilayah yang memang jauh dari kata maju seperti Sabah namun, tekad pemerintah dalam memajukan dan membangun turut membantu sehingga dapat mengurangi dan menutupi segala kekurangan wilayah perbatasan. Yang mana bila permasalahan-permasalahan semakin hari akan semakin berlanjut, seperti pada permasalahan kondisi infrastruktur dan kekurangan lapangan pekerjaan yang merupakan imbas dari kurangnya SDM di perbatasan yang membuat Lumbis Ogong sendiri pada studi kasus ini menjadi salah satu LOKPRI oleh BPPN. Lumbis Ogong menjadi kecamatan dari kabupaten Nunukan yang merupakan pusat administrasi dan pemerintahan. Namun, penduduk Lumbis Ogong aktivitasnya banyak mengandalkan dan bergantung pada Sabah dan bahkan bekerja mereka lebih memilih ke Kinabalu daripada ke Nunukan. Namun banyak hambatan yang menjadi alasan seperti jauhnya Nunukan dari Lumbis Ogong, tingginya syarat sedangkan pada Kinabalu banyak lapangan pekerjaan terbuka dan mudahnya akses menuju kesana oleh sebab itu penduduk lebih memilih ke Kinabalu dari pada ke Nunukan baik dari mencari sembako ataupun bekerja.

Melihat peluang yang ada serta mudahnya akses membuat penduduk melakukan usaha apapun dengan cara semaksimal mungkin demi mendapatkan keuntungan sebesar mungkin ketimbang harus bertahan di wilayah yang jauh dari kata sejahtera dan menjadi daerah terpencil dan tertinggal. Dengan alasan kebutuhan hidup dan bertahan di hidup dilakukanlah usaha apapun termasuk perubahan status kewarganegaraan Malaysia pada beberapa desa dari kecamatan Lumbis Ogong dengan harapan menjadi warga negara Malaysia lebih memajukan kehidupan warga perbatasan yang perpindah. Namun tidak jarang juga warga dari Lumbis Ogong memiliki dua KTP dari Indonesia dan IC Malaysia. Yang bertujuan untuk memudahkan mereka keluar masuk perbatasan dan mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintahan Malaysia.

Perubahan status kewarganegaraan tidak dapat dibiarkan begitu saja mengingat tiga desa yang ada di Lumbis Ogong yang masih menjadi pembahasan OBP oleh Indonesia dan Malaysia, yang akan rentan menjadi klaim wilayah. Dengan alasan penduduk yang merasakan pahit dan sulitnya bertahan hidup di Negeri sendiri, demi menyelamatkan hidup dan terus berjuang di tanah sendiri namun jauh dari kata cukup untuk menghidupi keluarga. Dengan terbukanya lapangan pekerjaan di pabrik dan lahan perekebunan dan tersedianya upah yang cukup membuat pemikiran-pemikiran untuk perpindah dengan melihat keluarga yang sukses di wilayah Negeri

Sabah, tentu saja membuat masyarakat berfikir mana lebih menguntungkan dalam hal ekonomi dengan melihat kemudahan-kemudahan yang didapat.

Dengan kata lain dari kesulitan yang ada di Lumbis ogong sebagian besarnya juga dirasakan pada Kabupaten Nunukan yang mana dari Nunukan sendiri memiliki banyak lokasi-lokasi yang memiliki potensi namun tidak di kelola dengan baik yang membuat permasalahan yang sama, yang memnbuat penduduk Lumbis Ogong lebih melihat ke arah Kinabalu walaupun antara Nunukan dan Kinabalu sama-sama kota atau kabupaten yang memiliki potensi namun standar atau syarat yang lebih tinggi di Nunukan daripada Kinabalu membuat penduduk Lumbis Ogong lebih melihat Kinabalu sebagai tempat lapangan pekerjaan yang terbuka bagi mereka dengan kemudahan akses yang lebih mudah dan biaya yang lebih murah menuju ke Kinabalu.

Hendaknya dalam kasus ini pemerintah lebih cekatan dalam melaksanakan dan menjalankan apa yang sudah di canangkan sehingga terciptalah kawasan yang diinginkan serta dilakukan sosialisasi ataupun pendekatan-pendekatan secara sosial. Untuk pembangunan infrastruktur dari APBD Nunukan dinaikkan sehingga kawasan perbatasan mudah untuk membangun apa-apa saja yang diperlukan seperti jembatan dan jalan beraspal. Dan jika sumber daya yang ada dikelola dengan baik, hasil yang didapat juga memuaskan bagi pemerintah dan masyarakat yang bermukim di perbatasan.

Referensi :

Sumber Buku

BPS, Nunukan dalam Angka 2012

BNPP, Grand Design Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Di Indonesia
Tahun 2011 – 2025

Elissa.ugm.ac.id

Ikhwanudin, Penyusunan Kebijakan Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia,
BAPPENAS

Kartikasari Wahyuni, Mempelajari Wilayah Perbatasan Sebagai Ruang Bersama, Vol 1, No 2, Hal 151, Jurnal UMY, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2012

Kementrian Kootdinator Politik dan Keamanan, 2003: 261

Laporan Akhir Evaluasi Permasalahan dan Perumusan Kebijakan Perdagangan Lintas Batas Kota Tarakan, 2014

Malaysia: The Millennium Development Goals di 2010" (PDF)

Mohtar Mas' oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi (Jakarta: LP3ES, 1990), hal.46

Rakhman, Ariel, Peran Provinsi Kalimantan Utara Sebagai Penanganan Permasalahan Perbatasan Indonesia-Malaysia, Skripsi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014

Seminar Nasional Pengembangan Kawasan Perbatasan Diselenggarakan oleh Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, 27-28 Mei 2015

Spruyt, Hendrik. 2000. "The End Of Empire and The Extension Of Westphalian System: The Normative Basis Of The Modern State System". Internatioanal Studies Association. Blackwell publishehrs

Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan "Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara & Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014", 2011

Website

<http://www.antaranews.com/berita/538232/sebanyak-954-warga-malaysia-ke-nunukan-menggunakan-plb>

<http://budiutomo79.blogspot.co.id/2007/09/pembangunan-wilayah-perbatasan.html>

<http://citizendaily.net/kjri-tawau-sabah-malaysia-penduduk-lumbis-ogong-masih-berstatus-wni/>

<http://www.gerbangilmu.com/2014/11/pengertian-tindakan-ekonomi-rasional.htm>

<http://industri.bisnis.com/read/20151030/45/487234/jalan-perbatasan-kalimantan-utara-ditargetkan-tembus-akhir-2015>

www.metrokaltra.com

<http://news.liputan6.com/read/2135147/isu-eksodus-warga-di-nunukan-mendagri-akui-ada-masalah>

<http://news.detik.com/berita/1260063/600-wni-lamar-jadi-wn-malaysia-per-tahun>

<http://repository.unri.ac.id//> Strategi Kependudukan Sebagai Landasan Rencana Pembangunan 2012-2020

<http://www.sabah.gov.my/main/ms/Home/About>

<http://satelitnews.co.id/bayar-rp19-juta-warga-perbatasan-miliki-ktp-malaysia/s>

<http://tasbara-bnpp.com/index.php/tasbaranews/berita-utama/pojok-bnpp/item/653-bnpp-segera-terbitkan-pedoman-pembinaan-garda-batas>

<http://tasbara-bnpp.com/index.php/tasbaranews/berita-utama/berita-tasbara/item/611-arrah-kebijakan-renaksi-pengelolaan-tasbara-2015>

<http://tasbara-bnpp.com/index.php/profil/lintas-batas-negara/program-strategis?tmpl=component&print=1>

<http://www.wilayahperbatasan.com/wilayah-perbatasan-penanganan-obp-outstanding-boundary-problems-ri-malaysia-belum-ada-kemajuan/>